



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 74 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG HASIL EVALUASI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/1145/M.SM.04.00/2022 hal Persetujuan Penetapan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, maka penetapan hasil evaluasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG HASIL EVALUASI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 5) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIIA dan disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB IIIA
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 5A

Pelaksanaan hasil evaluasi jabatan dalam Peraturan Bupati ini dapat dijadikan dasar pemberian tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur terhitung sejak tanggal 1 November 2022.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 14 November 2022

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 14 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.
NIP.19710602 200604 1 005

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR 74 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG
 HASIL EVALUASI JABATAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
 TIMUR

KELAS DAN NILAI JABATAN STRUKTURAL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

No.	Nama Jabatan	Kelas	Nilai Jabatan
1.	Sekretaris Daerah	15	3.555
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	14	3.030
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	14	3.030
4.	Asisten Administrasi Umum	14	3.030
5.	Sekretaris DPRD	14	2.865
6.	Inspektur	14	3.030
7.	Kepala Dinas Pendidikan	14	2.865
8.	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14	2.865
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14	2.865
10.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	14	2.865
11.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14	2.865
12.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	14	2.865
13.	Kepala Dinas Perikanan	14	2.865
14.	Kepala Dinas Perhubungan	14	2.865
15.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	14	2.865
16.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	14	2.865
17.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	14	2.865
18.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	14	2.865
19.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14	2.865
20.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	14	2.865
21.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	14	2.865
22.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	14	2.865
23.	Kepala Dinas Perpustakaan	14	2.865
24.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14	2.865
25.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	14	3.030
26.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	14	3.030
27.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14	2.865
28.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	13	2.715
29.	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan	13	2.715
30.	Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan	13	2.715
31.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	13	2.465
32.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	12	2.315
33.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	12	2.315
34.	Kepala Bagian Hukum	12	2.315

No.	Nama Jabatan	Kelas	Nilai Jabatan
35.	Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	12	2.315
36.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	12	2.315
37.	Kepala Bagian Organisasi	12	2.315
38.	Kepala Bagian Umum	12	2.315
39.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	12	2.315
40.	Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan	12	2.315
41.	Sekretaris Inspektorat	12	2.140
42.	Sekretaris Dinas Pendidikan	12	2.115
43.	Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12	2.115
44.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	2.115
45.	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	12	2.115
46.	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12	2.115
47.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	12	2.115
48.	Sekretaris Dinas Perikanan	12	2.115
49.	Sekretaris Dinas Perhubungan	12	2.115
50.	Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga	12	2.115
51.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	12	2.115
52.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	12	2.115
53.	Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan	12	2.115
54.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12	2.115
55.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	12	2.115
56.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	12	2.115
57.	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	12	2.115
58.	Sekretaris Dinas Perpustakaan	12	2.115
59.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12	2.115
60.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	12	2.140
61.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	12	2.140
62.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12	2.115
63.	Camat	12	2.315
64.	Direktur RSUD	12	2.315
65.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	11	2.090
66.	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	11	2.090
67.	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	11	2.090
68.	Inspektur Pembantu Wilayah I	11	1.990
69.	Inspektur Pembantu Wilayah II	11	1.990
70.	Inspektur Pembantu Wilayah III	11	1.990
71.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat	11	2.045
72.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	11	2.045
73.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	11	2.045
74.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	11	2.045
75.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	11	2.045
76.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	11	2.045
77.	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	11	2.045

No.	Nama Jabatan	Kelas	Nilai Jabatan
78.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	11	2.045
79.	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	11	2.045
80.	Kepala Bidang Tata Usaha	11	2.045
81.	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan	11	2.045
82.	Kepala Bidang Penunjang	11	2.045
83.	Kepala Bidang Bina Marga	11	2.045
84.	Kepala Bidang Sumber Daya Air	11	2.045
85.	Kepala Bidang Cipta Karya	11	2.045
86.	Kepala Bidang Penataan Ruang	11	2.045
87.	Kepala Bidang Penataan Perumahan	11	2.045
88.	Kepala Bidang Penataan Kawasan Permukiman	11	2.045
89.	Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga	11	2.045
90.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	11	2.045
91.	Kepala Bidang Penataan, Kerja Sama dan Administrasi Pemerintahan Desa	11	2.045
92.	Kepala Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan	11	2.045
93.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11	2.045
94.	Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	11	2.045
95.	Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah	11	2.045
96.	Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan Wilayah Pesisir	11	2.045
97.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha dan Diversifikasi Produk Perikanan	11	2.045
98.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	11	2.045
99.	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan	11	2.045
100.	Kepala Bidang Angkutan Jalan	11	2.045
101.	Kepala Bidang Pelayaran	11	2.045
102.	Kepala Bidang Pengembangan Bakat Olahraga dan Prestasi	11	2.045
103.	Kepala Bidang Pembudidayaan Olahraga dan Pengembangan Sarana dan Prasarana	11	2.045
104.	Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Kepramukaan	11	2.045
105.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	11	2.045
106.	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government	11	2.045
107.	Kepala Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik	11	2.045
108.	Kepala Bidang Promosi dan Perencanaan Penanaman Modal	11	2.045
109.	Kepala Bidang Pengendalian, Informasi dan Dokumentasi	11	2.045
110.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan	11	2.045
111.	Kepala Bidang Perdagangan	11	2.045
112.	Kepala Bidang Perindustrian	11	2.045
113.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	11	2.045
114.	Kepala Bidang Perkebunan	11	2.045
115.	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	11	2.045
116.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	11	2.045
117.	Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian	11	2.045
118.	Kepala Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk	11	2.045
119.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	11	2.045

No.	Nama Jabatan	Kelas	Nilai Jabatan
120.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	11	2.045
121.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	11	2.045
122.	Kepala Bidang Tata Lingkungan	11	2.045
123.	Kepala Bidang Persampahan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	11	2.045
124.	Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan	11	2.045
125.	Kepala Bidang Penataan Lingkungan	11	2.045
126.	Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	11	2.045
127.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	11	2.045
128.	Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	11	2.045
129.	Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata	11	2.045
130.	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata	11	2.045
131.	Kepala Bidang Kebudayaan	11	2.045
132.	Kepala Bidang Perpustakaan	11	2.090
133.	Kepala Bidang Kearsipan	11	2.045
134.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	11	2.045
135.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah	11	2.045
136.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	11	2.045
137.	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan	11	2.045
138.	Kepala Bidang Anggaran	11	2.045
139.	Kepala Bidang Data dan Informasi Pajak	11	2.045
140.	Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak	11	2.045
141.	Kepala Bidang Perbendaharaan	11	2.045
142.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	11	2.045
143.	Kepala Bidang Kekayaan Daerah	11	2.045
144.	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur	11	2.045
145.	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur	11	2.045
146.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur	11	2.045
147.	Sekretaris Camat	11	2.090
148.	Kepala Subbagian Administrasi Pemerintahan	9	1.430
149.	Kepala Subbagian Fasilitasi dan Kerja Sama	9	1.430
150.	Kepala Subbagian Otonomi Daerah dan Administrasi Kewilayahan	9	1.430
151.	Kepala Subbagian Bina Mental Spiritual	9	1.430
152.	Kepala Subbagian Kesejahteraan Sosial	9	1.430
153.	Kepala Subbagian Kesejahteraan Masyarakat	9	1.430
154.	Kepala Subbagian Perundang-Undangan	9	1.430
155.	Kepala Subbagian Bantuan Hukum	9	1.430
156.	Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	9	1.430
157.	Kepala Subbagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Serta Sumber Daya Alam	9	1.430
158.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	9	1.430
159.	Kepala Subbagian Administrasi Pembangunan	9	1.430
160.	Kepala Subbagian Pengelolaan Barang/Jasa	9	1.430

No.	Nama Jabatan	Kelas	Nilai Jabatan
161.	Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik	9	1.430
162.	Kepala Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	9	1.430
163.	Kepala Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	9	1.430
164.	Kepala Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana	9	1.430
165.	Kepala Subbagian Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	9	1.430
166.	Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	9	1.430
167.	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	9	1.430
168.	Kepala Subbagian Protokol	9	1.430
169.	Kepala Subbagian Dokumentasi dan Komunikasi Pimpinan	9	1.430
170.	Kepala Subbagian Keuangan	9	1.430
171.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan	9	1.430
172.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	9	1.430
173.	Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	9	1.430
174.	Kepala Subbagian Program dan Keuangan	9	1.430
175.	Kepala Subbagian Kajian Perundang-Undangan	9	1.430
176.	Kepala Subbagian Persidangan, Hubungan Masyarakat dan Protokol	9	1.430
177.	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	9	1.430
178.	Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan	9	1.430
179.	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	9	1.430
180.	Kepala Subbagian Keuangan dan Perencanaan	9	1.430
181.	kepala Subbagian Perencanaan	9	1.430
182.	Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini	9	1.430
183.	Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kursus	9	1.430
184.	Kepala Seksi Program, Data dan Prasarana	9	1.430
185.	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian	9	1.430
186.	Kepala Seksi Kesiswaan dan Peningkatan Mutu	9	1.430
187.	Kepala Seksi Kurikulum	9	1.430
188.	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat	9	1.430
189.	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar	9	1.430
190.	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama	9	1.430
191.	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	9	1.430
192.	Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	9	1.430
193.	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Lingkungan Kerja dan Olahraga	9	1.430
194.	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi	9	1.430
195.	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	9	1.430
196.	Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	9	1.430
197.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan	9	1.430
198.	Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan	9	1.430
199.	Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan	9	1.430
200.	Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan	9	1.430
201.	Kepala Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh dan Kader Keluarga Berencana	9	1.430

No.	Nama Jabatan	Kelas	Nilai Jabatan
202.	Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga	9	1.430
203.	Kepala Seksi Jaminan Ber-Keluarga Berencana	9	1.430
204.	Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-Keluarga Berencana	9	1.430
205.	Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	9	1.430
206.	Kepala Seksi Pelayanan Medik	9	1.430
207.	Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan	9	1.430
208.	Kepala Seksi Penunjang Medik	9	1.430
209.	Kepala Seksi Penunjang Non Medik	9	1.430
210.	Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	9	1.430
211.	Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	9	1.430
212.	Kepala Seksi Peralatan dan Laboratorium	9	1.430
213.	Kepala Seksi Pengelolaan Irigasi dan Jaringan Pemanfaatan Air	9	1.430
214.	Kepala Seksi Pengelolaan Jaringan Sumber Air	9	1.430
215.	Kepala Seksi Penataan Bangunan	9	1.430
216.	Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	9	1.430
217.	Kepala Seksi Penataan Drainase	9	1.430
218.	Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang	9	1.430
219.	Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	9	1.430
220.	Kepala Seksi Pertanahan	9	1.430
221.	Kepala UPT Pengelolaan Air Minum	9	1.430
222.	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Perumahan	9	1.430
223.	Kepala Seksi Penyediaan dan Pengembangan Perumahan	9	1.430
224.	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Kawasan Permukiman	9	1.430
225.	Kepala Seksi Penyediaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	9	1.430
226.	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial	9	1.430
227.	Kepala Seksi Perlindungan Korban Bencana Sosial dan Alam	9	1.430
228.	Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga	9	1.430
229.	Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin	9	1.430
230.	Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat terpencil dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial	9	1.430
231.	Kepala Seksi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	9	1.430
232.	Kepala Seksi Penataan Desa	9	1.430
233.	Kepala Seksi Kerja Sama dan Administrasi Pemerintahan Desa	9	1.430
234.	Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat	9	1.430
235.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kemasyarakatan	9	1.430
236.	Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender	9	1.430
237.	Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	9	1.430
238.	Kepala Seksi Perlindungan Hak Anak dan Sistem Data Gender	9	1.430
239.	Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	9	1.430
240.	Kepala Seksi Operasional Pengendalian dan Ketertiban Umum	9	1.430
241.	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat	9	1.430

No.	Nama Jabatan	Kelas	Nilai Jabatan
242.	Kepala Seksi Operasional Penegakan Produk Hukum Daerah	9	1.430
243.	Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan	9	1.430
244.	Kepala Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil	9	1.430
245.	Kepala Seksi Pengelolaan Wilayah Pesisir	9	1.430
246.	Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Perikanan	9	1.430
247.	Kepala Seksi Disverifikasi dan Promosi Produk Perikanan	9	1.430
248.	Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan	9	1.430
249.	Kepala Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	9	1.430
250.	Kepala UPT Balai Perikanan Budidaya	9	1.430
251.	Kepala UPT Pengolahan Hasil Perikanan	9	1.430
252.	Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	9	1.430
253.	Kepala Seksi Perlengkapan Jalan	9	1.430
254.	Kepala Seksi Keselamatan dan Pengujian Kendaraan Bermotor	9	1.430
255.	Kepala Seksi Angkutan Dalam Trayek dan Terminal	9	1.430
256.	Kepala Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Barang	9	1.430
257.	Kepala Seksi Kepelabuhanan	9	1.430
258.	Kepala Seksi Pembibitan dan Pemanduan Bakat Olahraga dan Prestasi	9	1.430
259.	Kepala Seksi Pembinaan Bakat Olahraga Pendidikan dan Prestasi	9	1.430
260.	Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Industri Olahraga	9	1.430
261.	Kepala Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan	9	1.430
262.	Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	9	1.430
263.	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	9	1.430
264.	Kepala Seksi Layanan Informasi Publik dan Kehumasan	9	1.430
265.	Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi	9	1.430
266.	Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi	9	1.430
267.	Kepala Seksi Layanan e-Government	9	1.430
268.	Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi	9	1.430
269.	Kepala Seksi Statistik dan Pengelolaan Data	9	1.430
270.	Kepala Seksi Promosi dan Kerja Sama Investasi	9	1.430
271.	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	9	1.430
272.	Kepala Seksi Pengendalian Penanaman Modal dan Penanganan Pengaduan	9	1.430
273.	Kepala Seksi Dokumentasi, Data dan Informasi	9	1.430
274.	Kepala Seksi Pelayanan Pendaftaran	9	1.430
275.	Kepala Seksi Perizinan Dasar dan Non Perizinan	9	1.430
276.	Kepala Seksi Perizinan Usaha	9	1.430
277.	Kepala Seksi Bina Usaha dan Distribusi Perdagangan	9	1.430
278.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan	9	1.430
279.	Kepala Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen	9	1.430
280.	Kepala Seksi Industri Pangan, Sandang dan Aneka	9	1.430
281.	Kepala Seksi Industri Kerajinan, Logam dan Kimia	9	1.430
282.	Kepala Seksi Pengembangan Wilayah Industri	9	1.430
283.	Kepala UPT Pengelola Pasar	9	1.430
284.	Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	9	1.430
285.	Kepala Seksi Produksi dan Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura	9	1.430

No.	Nama Jabatan	Kelas	Nilai Jabatan
286.	Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura	9	1.430
287.	Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan	9	1.430
288.	Kepala Seksi Produksi dan Usaha Perkebunan	9	1.430
289.	Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	9	1.430
290.	Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi	9	1.430
291.	Kepala Seksi Kesehatan Hewan	9	1.430
292.	Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	9	1.430
293.	Kepala Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	9	1.430
294.	Kepala Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan	9	1.430
295.	Kepala Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan	9	1.430
296.	Kepala Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	9	1.430
297.	Kepala Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian	9	1.430
298.	Kepala UPT Balai Perbenihan Tanaman	9	1.430
299.	Kepala Seksi Identitas Penduduk	9	1.430
300.	Kepala Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk	9	1.430
301.	Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian	9	1.430
302.	Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan	9	1.430
303.	Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	9	1.430
304.	Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	9	1.430
305.	Kepala Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan	9	1.430
306.	Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	9	1.430
307.	Kepala Seksi Penataan dan Pemeliharaan Lingkungan	9	1.430
308.	Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	9	1.430
309.	Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan	9	1.430
310.	Kepala Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan	9	1.430
311.	Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	9	1.430
312.	Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan	9	1.430
313.	Kepala UPT Laboratorium Lingkungan	9	1.430
314.	Kepala Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja	9	1.430
315.	Kepala Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	9	1.430
316.	Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Penyelesaian Perselisihan	9	1.430
317.	Kepala Seksi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	9	1.430
318.	Kepala Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	9	1.430
319.	Kepala Seksi Usaha dan Promosi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	9	1.430
320.	Kepala Seksi Destinasi Wisata	9	1.430
321.	Kepala Seksi Industri Pariwisata	9	1.430
322.	Kepala Seksi Pemasaran Pariwisata	9	1.430
323.	Kepala Seksi Kelembagaan Pariwisata	9	1.430
324.	Kepala Seksi Kesenian	9	1.430
325.	Kepala Seksi Warisan dan Tradisi	9	1.430
326.	Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya, Sejarah dan Permuseuman	9	1.430

No.	Nama Jabatan	Kelas	Nilai Jabatan
327.	Kepala Seksi Pengembangan Koleksi, Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka	9	1.430
328.	Kepala Seksi Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	9	1.430
329.	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	9	1.430
330.	Kepala Seksi Pengelolaan, Layanan dan Pemanfaatan Arsip	9	1.430
331.	Kepala Sekretariat Pelaksana	9	1.430
332.	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	9	1.430
333.	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik	9	1.430
334.	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	9	1.430
335.	Kepala Subbidang Perencanaan dan Pendanaan	9	1.430
336.	Kepala Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	9	1.430
337.	Kepala Subbidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan	9	1.430
338.	Kepala Subbidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi	9	1.430
339.	Kepala Subbidang Pemerintahan	9	1.430
340.	Kepala Subbidang Pembangunan Manusia	9	1.430
341.	Kepala Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	9	1.430
342.	Kepala Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan	9	1.430
343.	Kepala Subbidang Penyusunan Anggaran	9	1.430
344.	Kepala Subbidang Pengendalian Anggaran	9	1.430
345.	Kepala Subbidang Ekstensifikasi Pajak	9	1.430
346.	Kepala Subbidang Pengolahan Data dan Informasi Pajak	9	1.430
347.	Kepala Subbidang Penetapan dan Penagihan Pajak	9	1.430
348.	Kepala Subbidang Pengawasan Pemeriksaan dan Pelaporan	9	1.430
349.	Kepala Subbidang Belanja Tidak Langsung	9	1.430
350.	Kepala Subbidang Belanja Langsung	9	1.430
351.	Kepala Subbidang Administrasi Perbendaharaan	9	1.430
352.	Kepala Subbidang Akuntansi dan Pelaporan	9	1.430
353.	Kepala Subbidang Pertanggungjawaban dan Informasi Keuangan Daerah	9	1.430
354.	Kepala Subbidang Inventarisasi dan Penilaian	9	1.430
355.	Kepala Subbidang Perencanaan dan Pemanfaatan	9	1.430
356.	Kepala Subbidang Pengendalian dan Penatausahaan	9	1.430
357.	Kepala Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian	9	1.430
358.	Kepala Subbidang Data, Informasi dan Fasilitasi Profesi Aparatur Sipil Negara	9	1.430
359.	Kepala Subbidang Mutasi dan Kepangkatan	9	1.430
360.	Kepala Subbidang Pengembangan Karier dan Promosi Aparatur	9	1.430
361.	Kepala Subbidang Penjenjangan, Sertifikasi dan Teknis Fungsional	9	1.430
362.	Kepala Subbidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur	9	1.430
363.	Kepala Seksi Kesatuan Bangsa	9	1.430
364.	Kepala Seksi Pembinaan Politik dan Masyarakat	9	1.430
365.	Kepala Seksi Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba dan Penyakit Masyarakat	9	1.430
366.	Kepala Subbidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama	9	1.430
367.	Kepala Subbidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Masyarakat	9	1.430
368.	Kepala Subbidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik	9	1.430
369.	Kepala Seksi Pemerintahan	9	1.455

No.	Nama Jabatan	Kelas	Nilai Jabatan
370.	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9	1.455
371.	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	9	1.455
372.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	9	1.455
373.	Kepala Seksi Pelayanan	9	1.455
374.	Kepala Subbagian Fasilitasi Penganggaran	8	1.295
375.	Kepala Subbagian Fasilitasi Pengawasan	8	1.295
376.	Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas	8	1.295
377.	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1.295
378.	Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Air Minum	8	1.295
379.	Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Balai Perikanan Budidaya	8	1.295
380.	Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Perairan	8	1.295
381.	Kepala Seksi Olahraga Rekreasi, Kemasyarakatan dan Layanan Khusus	8	1.295
382.	Kepala Seksi Pengelolaan Sampah	8	1.295
383.	Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan	8	1.295
384.	Kepala Seksi Pembiayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8	1.295

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.

NIP.19710602 200604 1 005

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR 74 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG HASIL
 EVALUASI JABATAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KELAS DAN NILAI JABATAN PELAKSANA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

No.	Nama Jabatan	Kelas	Nilai Jabatan
1.	Analisis Pemerintahan Daerah	7	890
2.	Analisis Kerja Sama	7	890
3.	Analisis Bina Kehidupan Agama	7	890
4.	Analisis Kerjasama Lembaga Keagamaan	7	890
5.	Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	7	890
6.	Penyusun Rancangan Perundang-Undangan	7	890
7.	Analisis Konsultasi dan Bantuan Hukum	7	890
8.	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	7	890
9.	Analisis Ekonomi Kreatif	7	890
10.	Analisis Perekonomian	7	890
11.	Analisis Program Pembangunan	7	890
12.	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa	7	890
13.	Analisis Jabatan	7	890
14.	Analisis Organisasi dan Tata Laksana	7	890
15.	Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	7	890
16.	Analisis Pelayanan Publik	7	890
17.	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	7	890
18.	Bendahara	7	890
19.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	890
20.	Analisis Humas	7	890
21.	Penata Acara	7	890
22.	Analisis Produk Hukum	7	890
23.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	890
24.	Analisis Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	7	890
25.	Analisis Kursus dan Pelatihan	7	890
26.	Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembelajaran	7	890
27.	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran	7	890
28.	Analisis Mutu Pendidikan	7	890
29.	Analisis Kualifikasi dan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7	890
30.	Pemeriksa Sanitasi	7	890
31.	Analisis Kesehatan	7	890
32.	Analisis Kesehatan Ibu dan Anak	7	890
33.	Analisis Kesehatan Kerja	7	890
34.	Analisis Kimia	7	890
35.	Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur	7	890
36.	Penata Keuangan	7	890
37.	Pemeriksa Kependudukan	7	890
38.	Pengawas Kependudukan	7	890
39.	Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit	7	890
40.	Penyusun Kependudukan dan Keluarga Berencana	7	890
41.	Analisis Mekanisme Operasional Keluarga Berencana	7	890
42.	Penyuluh Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera	7	890
43.	Analisis Data dan Informasi	7	890

No.	Nama Jabatan	Kelas	Nilai Jabatan
44.	Penyusun Penyuluh Keluarga Berencana	7	890
45.	Penyuluh Kemasyarakatan	7	890
46.	Penyusun Bahan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana	7	890
47.	Analisis Sarana Pelayanan	7	890
48.	Pemeriksa Pelayanan Keluarga Berencana	7	890
49.	Penyusun Bahan Kesertaan Keluarga Berencana	7	890
50.	Penyusun Bahan Ketahanan Keluarga	7	890
51.	Penyusun Bahan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana	7	890
52.	Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit	7	890
53.	Analisis Penyakit Menular	7	890
54.	Analisis Penanggulangan Krisis Kesehatan	7	890
55.	Analisis Obat dan Makanan	7	890
56.	Analisis Pembayaran Jaminan Kesehatan	7	890
57.	Inspektur Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7	890
58.	Pemeriksa Anggaran	7	890
59.	Pemeriksa laporan dan Transaksi Keuangan	7	890
60.	Analisis Jalan dan Jembatan	7	890
61.	Penelaah Pengelolaan Leger Jalan	7	890
62.	Pengawas Jalan dan Jembatan	7	890
63.	Pemeriksa Jalan dan Jembatan	7	890
64.	Penelaah Bahan Jalan	7	890
65.	Penguji Laboratorium Tanah, Aspal dan Beton	7	890
66.	Pengawas Irigasi	7	890
67.	Analisis Pengembangan Infrastruktur	7	890
68.	Analisis Pengelolaan Sumber Daya Air	7	890
69.	Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	7	890
70.	Pengawas Bangunan dan Gedung	7	890
71.	Penata Penyehatan Lingkungan Pemukiman	7	890
72.	Penyusun Rencana Tata Ruang	7	890
73.	Analisis Tata Ruang	7	890
74.	Pengawas Tata Ruang	7	890
75.	Analisis Pemanfaatan Ruang	7	890
76.	Analisis Hukum Pertanahan	7	890
77.	Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan	7	890
78.	Pengawas Fisik Permukiman	7	890
79.	Analisis Pembangunan	7	890
80.	Penyusun Pemberian Bantuan Teknis	7	890
81.	Penyusun Bahan Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan	7	890
82.	Penyusun Rencana Peningkatan Peran Serta Masyarakat	7	890
83.	Penyuluh Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	7	890
84.	Pengawas Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	7	890
85.	Analisis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	7	890
86.	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak	7	890
87.	Analisis Perlindungan Perempuan	7	890
88.	Petugas Penindakan	7	890
89.	Penyidik	7	890
90.	Pengembang Program Penyuluhan	7	890
91.	Analisis Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan	7	890

No.	Nama Jabatan	Kelas	Nilai Jabatan
92.	Analisis Kenelayanan	7	890
93.	Analisis Pendaftaran Kapal Perikanan	7	890
94.	Analisis Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir	7	890
95.	Analisis Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir	7	890
96.	Penyusun Rencana Bahan Teknis Prasarana dan Sarana Budidaya	7	890
97.	Penyusun Rencana Pemanfaatan Jenis Ikan	7	890
98.	Analisis Mutu Hasil Perikanan	7	890
99.	Penyusun Rencana Kelembagaan Pasar Hasil Perikanan	7	890
100.	Analisis Perikanan Budidaya	7	890
101.	Analisis Benih	7	890
102.	Pengelola Teknis Perikanan Budidaya	7	890
103.	Penyusun Rekayasa Lalu Lintas	7	890
104.	Penyusun Kebutuhan Perlengkapan Jalan	7	890
105.	Pengawas Keselamatan Darat/Jalan	7	890
106.	Pengawas Pengujian Kendaraan Bermotor	7	890
107.	Pengawas Angkutan dan Terminal	7	890
108.	Pengawas dan Pembina Angkutan	7	890
109.	Penyuluh Olahraga	7	890
110.	Analisis Keolahragaan	7	890
111.	Analisis Kepemudaan	7	890
112.	Penyuluh Kepemudaan	7	890
113.	Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana	7	890
114.	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	890
115.	Pemeriksa Teknologi Informasi	7	890
116.	Penyusun Rencana Promosi	7	890
117.	Penyusun Rencana Permodalan	7	890
118.	Analisis Kerjasama dan Permodalan	7	890
119.	Penyusun Perkembangan Harga dan Pengkajian Pasar	7	890
120.	Analisis Bidang Pengawasan	7	890
121.	Analisis Dokumen Perizinan	7	890
122.	Penyusun Rencana Peningkatan Akses Pasar	7	890
123.	Penyusun Rencana Bahan Teknis Produksi	7	890
124.	Penyusun Rencana Bimbingan Teknis Manajemen Mutu Produksi	7	890
125.	Pengawas Industri	7	890
126.	Analisis Industri	7	890
127.	Penelaah Data Sumber Benih	7	890
128.	Penata Dokumen Hasil Produksi	7	890
129.	Analisis Informasi Pasar Hasil Pertanian	7	890
130.	Analisis Peningkatan Usaha Pertanian dan Agrobisnis	7	890
131.	Pengawas Pupuk dan Pestisida	7	890
132.	Penelaah Data Sertifikasi Mutu Benih/Bibit	7	890
133.	Analisis Pengelola Data Komoditas Perkebunan	7	890
134.	Analisis Pengelolaan Komoditas Perkebunan	7	890
135.	Pengawas Penyakit dan Pengendali Hewan	7	890
136.	Pengawas Hygiene, Sanitasi Usaha Peternakan dan Kesehatan Masyarakat	7	890
137.	Pengawas Sanitasi Usaha Peternakan, dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	7	890
138.	Pengawas Harga Pangan	7	890
139.	Analisis Pola Konsumsi Pangan Masyarakat	7	890
140.	Analisis Kapasitas Penyuluh	7	890
141.	Analisis Pelayanan	7	890

No.	Nama Jabatan	Kelas	Nilai Jabatan
142.	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7	890
143.	Analisis Lingkungan Hidup	7	890
144.	Penelaah Dampak Lingkungan	7	890
145.	Penyuluh Lingkungan Hidup	7	890
146.	Analisis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup	7	890
147.	Analisis Laporan Hasil Pengawasan	7	890
148.	Penyusun Program Pengawasan Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup	7	890
149.	Peneliti Laboratorium	7	890
150.	Instruktur Vokasional	7	890
151.	Analisis Kompetensi dan Kualifikasi Ketenagaan	7	890
152.	Analisis Bahan Kelembagaan dan Kerja Sama Hubungan Industrial	7	890
153.	Analisis Bahan Pengupahan	7	890
154.	Analisis Bahan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	7	890
155.	Analisis Tenaga Kerja	7	890
156.	Analisis Penempatan Tenaga Kerja	7	890
157.	Penyuluh Tenaga Kerja	7	890
158.	Penyuluh Koperasi	7	890
159.	Analisis Bimbingan Usaha	7	890
160.	Penelaah Pengembangan Usaha	7	890
161.	Analisis Objek Wisata	7	890
162.	Analisis Pariwisata	7	890
163.	Penyusun Promosi dan Kerja Sama	7	890
164.	Penyuluh Wisata	7	890
165.	Analisis Kesenian dan Budaya Daerah	7	890
166.	Analisis Warisan Budaya	7	890
167.	Penyuluh Perpustakaan	7	890
168.	Penata Laporan Keuangan	7	890
169.	Penelaah Bahan Kajian Bencana Alam	7	890
170.	Penyelidik Geologi	7	890
171.	Penyuluh Bencana	7	890
172.	Konselor	7	890
173.	Penyusun Penelitian dan Pengembangan	7	890
174.	Analisis Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran	7	890
175.	Analisis Kebijakan Pelaksanaan Anggaran	7	890
176.	Analisis Pengelolaan Keuangan	7	890
177.	Analisis Laporan Keuangan	7	890
178.	Analisis Pertanahan	7	890
179.	Analisis Perencanaan	7	890
180.	Analisis Pajak dan Retribusi Daerah	7	890
181.	Analisis Survei, Pengukuran, dan Pemetaan	7	890
182.	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	7	890
183.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	7	890
184.	Penyusun Rencana Mutasi	7	890
185.	Analisis Kinerja	7	890
186.	Analisis Program Diklat	7	890
187.	Analisis Fasilitasi dan Peningkatan Kompetensi	7	890
188.	Analisis Kelembagaan Masyarakat	7	890
189.	Analisis Politik Dalam Negeri	7	890
190.	Analisis Narkoba	7	890
191.	Analisis Wawasan Kebangsaan	7	890

No.	Nama Jabatan	Kelas	Nilai Jabatan
192.	Analisis Ketahanan Ekonomi	7	890
193.	Analisis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	7	890
194.	Analisis Desa dan Kelurahan	7	890
195.	Analisis Pemberdayaan Masyarakat	7	890
196.	Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Masalah Sosial	7	890
197.	Pengawas Pemanfaatan Tanah	7	890
198.	Penyuluh Keamanan Masyarakat	7	890
199.	Pengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	6	690
200.	Pengelola Penyelenggaraan Otonomi Daerah	6	690
201.	Pengelola Administrasi Pemerintahan	6	690
202.	Pengelola Bantuan Keagamaan	6	690
203.	Pengelola Fasilitas Bantuan Hukum	6	690
204.	Pengolah Data Sistem Informasi dan Diseminasi Hukum	6	690
205.	Pengolah Data Ekonomi	6	690
206.	Pengelola Data Statistik	6	690
207.	Pengolah Data	6	690
208.	Pengelola LPSE	6	690
209.	Pengelola Perangkat Kecamatan	6	690
210.	Pranata Barang dan Jasa	6	690
211.	Pengelola Unit Layanan Pengadaan	6	690
212.	Pengolah Data Kelembagaan	6	690
213.	Pengelola Akuntabilitas	6	690
214.	Pengelola Data Tata Organisasi dan Tata Laksana	6	690
215.	Pengelola Kepegawaian	6	690
216.	Pengelola Barang Milik Negara	6	690
217.	Pengelola Bangunan Gedung	6	690
218.	Pengelola Perjalanan Dinas	6	690
219.	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690
220.	Pengelola Kendaraan	6	690
221.	Ajudan	6	690
222.	Notulis Rapat	6	690
223.	Petugas Protokol	6	690
224.	Tenaga Peliputan	6	690
225.	Sekretaris	6	690
226.	Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	6	690
227.	Pengelola Bahan Perencanaan	6	690
228.	Pengelola Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini	6	690
229.	Pengelola Data Kelembagaan Kursus dan Pelatihan	6	690
230.	Pengelola Data Sarana dan Prasarana Pendidikan	6	690
231.	Pengelola Data Mutu Pendidikan	6	690
232.	Pengelola Data Tenaga Kependidikan	6	690
233.	Pengelola Laboratorium	6	690
234.	Pengelola Program Gizi	6	690
235.	Pengelola Program Kesehatan Keluarga	6	690
236.	Pengelola Penggerak Peran Serta Masyarakat di Bidang Kesehatan	6	690
237.	Pengelola Pengamatan Penyakit dan Imunisasi	6	690
238.	Pengelola Program Imunisasi	6	690
239.	Pengelola Pemberantasan Penyakit Menular Langsung	6	690
240.	Pengelola Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang	6	690
241.	Pengelola Penyakit Tidak Menular	6	690
242.	Pengelola Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	6	690

No.	Nama Jabatan	Kelas	Nilai Jabatan
243.	Pengelola Pelayanan Kesehatan	6	690
244.	Pengelola Obat dan Alat-alat Kesehatan	6	690
245.	Pengelola Kefarmasian	6	690
246.	Pengelola Penyelenggaraan Diklat	6	690
247.	Pengelola Profesi Sumber Daya Manusia	6	690
248.	Pengelola Advokasi Konseling dan Pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	6	690
249.	Pengelola Pelayanan dan Pembinaan Kelembagaan Keluarga Berencana	6	690
250.	Pengelola Bina Kesejahteraan Keluarga	6	690
251.	Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	690
252.	Pengelola Layanan Kehumasan	6	690
253.	Pengolah Data Pembayaran Jaminan Kesehatan	6	690
254.	Pengelola Rujukan Kesehatan	6	690
255.	Pengelola Keperawatan	6	690
256.	Pengelola Poliklinik	6	690
257.	Pengelola Pelayanan Penunjang Diagnostik dan Logistik	6	690
258.	Pengelola Data Laporan dan Pengaduan	6	690
259.	Pengelola Data Investigasi Internal	6	690
260.	Pengelola Kebidanan	6	690
261.	Kartografer	6	690
262.	Pengelola Pemeliharaan Jalan	6	690
263.	Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi	6	690
264.	Pengelola Inspeksi Sungai, Danau dan Penyeberangan	6	690
265.	Pengelola Keuangan	6	690
266.	Pengelola Tata Ruang	6	690
267.	Pengelola Irigasi	6	690
268.	Pengelola Perencanaan Teknis Tata Bangunan	6	690
269.	Pengolah Pengelolaan Sumber Daya Air	6	690
270.	Pengelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang	6	690
271.	Pengelola Data Penatagunaan Tanah	6	690
272.	Koordinator Pergudangan	6	690
273.	Pengelola Rehabilitasi Sosial	6	690
274.	Pengelola Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Lansia	6	690
275.	Pranata Bencana	6	690
276.	Pengelola Data Bantuan Sosial	6	690
277.	Pengelola Pembinaan Bantuan	6	690
278.	Pengelola Rencana Sosial dan Kesehatan	6	690
279.	Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah	6	690
280.	Pengelola Data Komunitas Adat	6	690
281.	Pengelola Bimbingan Sosial	6	690
282.	Pengelola Data Bimbingan dan Konseling	6	690
283.	Pengelola Kekayaan dan Administrasi Desa	6	690
284.	Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa	6	690
285.	Pengelola Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	6	690
286.	Pengelola Informasi dan Kerja Sama	6	690
287.	Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	6	690
288.	Pengelola Data Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	6	690
289.	Pengelola Penguatan Pengarusutamaan Gender	6	690
290.	Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak	6	690

No.	Nama Jabatan	Kelas	Nilai Jabatan
291.	Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan	6	690
292.	Pengelola Pengendalian Masyarakat	6	690
293.	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	6	690
294.	Pranata Perlindungan Masyarakat	6	690
295.	Pengelola Pelanggaran Peraturan Daerah	6	690
296.	Pengolah Data Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan	6	690
297.	Pengelola Pengawasan Penangkapan Ikan	6	690
298.	Pengelola Pengembangan dan Pembinaan Usaha	6	690
299.	Pengelola Jasa Pangkalan Pendaratan Ikan	6	690
300.	Pengelola Statistik Perikanan	6	690
301.	Pengelola Pengawasan, Pengolahan, Pengangkutan dan Pemasaran Ikan	6	690
302.	Pengelola Pelaksanaan Pengujian Mutu Secara Laboratoris Terhadap Produk Hasil Perikanan	6	690
303.	Pengelola Pengawasan Pembudidayaan Ikan	6	690
304.	Pengelola Pengembangan Budidaya dan Pemasaran Ikan	6	690
305.	Pengelola Distribusi dan Pemasaran	6	690
306.	Pengelola Terminal	6	690
307.	Pengelola Sarana Angkutan	6	690
308.	Pengelola Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	6	690
309.	Pengelola Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Sungai, Danau dan Penyeberangan	6	690
310.	Pengelola Manajemen Transportasi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	6	690
311.	Pengelola Data	6	690
312.	Pengelola Sarana dan Prasarana	6	690
313.	Pengelola Pengaduan Publik	6	690
314.	Jurnalis	6	690
315.	Pengelola Jaringan Telekomunikasi	6	690
316.	Pengelola Sistem dan Jaringan	6	690
317.	Pengelola Penyelenggaraan Media Elektronik	6	690
318.	Pengelola Situs/Web	6	690
319.	Pranata Alat Persandian	6	690
320.	Operator Sandi dan Telekomunikasi	6	690
321.	Operator Transmisi Sandi	6	690
322.	Pengelola Keamanan Sistem Informasi	6	690
323.	Pengelola Kerjasama dan Investasi	6	690
324.	Pengelola Data Layanan Publik dan Hubungan Investor	6	690
325.	Pengelola Dokumentasi	6	690
326.	Pengelola Dokumen Perizinan	6	690
327.	Pengelola Metrologi dan Perlindungan Konsumen	6	690
328.	Pengelola Pasar	6	690
329.	Pengelola Program dan Kegiatan	6	690
330.	Pengelola Bahan Perencanaan dan Pelaporan Usaha Tani	6	690
331.	Pengelola Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman	6	690
332.	Pengelola Teknologi Perbenihan	6	690
333.	Pengelola Alat dan Mesin Pertanian	6	690
334.	Pengelola Tata Guna Lahan, Air, Sarana dan Prasarana Pertanian	6	690
335.	Pengelola Tanaman Pangan dan Hortikultura	6	690
336.	Pranata Pengembangan Bibit Tanaman Hutan/Perkebunan	6	690
337.	Pengelola Penilai Usaha Perkebunan	6	690
338.	Pengelola Data Pasca Panen	6	690

No.	Nama Jabatan	Kelas	Nilai Jabatan
339.	Pengelola Budidaya Pengembangan Ternak dan Hewan Lainnya	6	690
340.	Pengelola Kesehatan Ternak Besar, Kecil dan Unggas	6	690
341.	Pengelola Rumah Potong Hewan	6	690
342.	Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	6	690
343.	Pengelola Ketahanan Pangan	6	690
344.	Pengelola Pola Pangan Harapan	6	690
345.	Pengelola Bahan Database Kelembagaan Petani	6	690
346.	Pengelola Database Kelembagaan Petani	6	690
347.	Pengelola Program Penyuluhan	6	690
348.	Pengelola Administrasi Sistem Informasi Penyuluh Pertanian	6	690
349.	Penguji Coba Perbibitan dan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	6	690
350.	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	6	690
351.	Pengelola Laboratorium Pengolahan Hasil dan Kultur Jaringan	6	690
352.	Pranata Laporan Keuangan	6	690
353.	Pengelola Data Pelayanan	6	690
354.	Pengelola Mutasi Penduduk	6	690
355.	Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi Data	6	690
356.	Pengolah Data Administrasi dan Verifikasi Data	6	690
357.	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	6	690
358.	Pengalih Media	6	690
359.	Pengelola Informasi Lingkungan	6	690
360.	Pengelola Pemeliharaan Konservasi Lingkungan dan Kawasan Konservasi	6	690
361.	Pengelola Dokumen Mengenai Dampak Lingkungan	6	690
362.	Pengelola Lingkungan	6	690
363.	Pengelola Sampah	6	690
364.	Pengelola Penyehatan Lingkungan	6	690
365.	Pengelola Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup	6	690
366.	Pengelola Tenaga Kerja	6	690
367.	Pengelola Kebijakan Kelembagaan	6	690
368.	Pengelola Bahan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	6	690
369.	Pranata Koperasi	6	690
370.	Pengelola Data Kreatifitas dan Inovasi	6	690
371.	Pengelola Permodalan Koperasi, Usaha Kecil, Mikro dan Menengah	6	690
372.	Pengelola Objek Wisata	6	690
373.	Pengelola Promosi dan Informasi Wisata	6	690
374.	Pengelola Data Warisan Budaya	6	690
375.	Pengelola Data Sejarah	6	690
376.	Pengelola Cagar Budaya dan Koleksi Museum	6	690
377.	Pengelola Bahan Pustaka	6	690
378.	Pengelola Pustaka Elektronik	6	690
379.	Pengolah Bahan Untuk Rencana Penanggulangan Bencana	6	690
380.	Pranata Pemadam Kebakaran	6	690
381.	Pengelola Pelaksanaan Program dan Anggaran	6	690
382.	Pengelola Penelitian	6	690
383.	Verifikator Anggaran	6	690
384.	Pengolah Data Pendataan, Pemetaan dan Penilaian	6	690
385.	Pengolah Data dan Potensi Pajak	6	690
386.	Pengelola Data dan Informasi Perpajakan	6	690

No.	Nama Jabatan	Kelas	Nilai Jabatan
387.	Pengolah Data Penagihan Pajak	6	690
388.	Pengolah Data Pemeriksaan Pajak	6	690
389.	Verifikator Keuangan	6	690
390.	Pengolah Data Anggaran dan Perbendaharaan	6	690
391.	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690
392.	Pengelola Laporan Keuangan Daerah	6	690
393.	Pengelola Gaji	6	690
394.	Pengelola Anggaran	6	690
395.	Pengelola Pengembangan Karir	6	690
396.	Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai	6	690
397.	Pengelola Disiplin Pegawai	6	690
398.	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	6	690
399.	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai	6	690
400.	Pengelola Data Program Pengembangan Tenaga Teknis dan Fungsional Non-Teknis	6	690
401.	Pengelola Organisasi Politik dan Organisasi Masyarakat	6	690
402.	Pengelola Kesejahteraan Sosial	6	690
403.	Pengolah Data Pelayanan	6	690
404.	Pengelola Kerja Sama	6	690
405.	Pengadministrasi Pemerintahan	5	490
406.	Pengadministrasi Umum	5	490
407.	Pengadministrasi LPSE	5	490
408.	Pengadministrasi Hukum	5	490
409.	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490
410.	Pemelihara Kendaraan	5	490
411.	Pengadministrasi Keuangan	5	490
412.	Pengadministrasi Rapat	5	490
413.	Pengadministrasi Risalah	5	490
414.	Pengadministrasi Data Peraturan Perundang-undangan	5	490
415.	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	490
416.	Pengadministrasi Kurikulum	5	490
417.	Pengadministrasi Program Pemberantasan Penyakit Menular	5	490
418.	Pengadministrasi Gudang Farmasi	5	490
419.	Pengadministrasi Tugas Belajar/Izin Belajar	5	490
420.	Pengadministrasi Pelatihan	5	490
421.	Pengadministrasi Alat dan Obat Kontrasepsi	5	490
422.	Binatu Rumah Sakit	5	490
423.	Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	5	490
424.	Pemelihara Peralatan	5	490
425.	Teknisi Keciptakarya	5	490
426.	Teknisi Air	5	490
427.	Pemelihara Sarana dan Prasarana	5	490
428.	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	5	490
429.	Penagih Retribusi	5	490
430.	Juru Survey Permukiman Perumahan	5	490
431.	Pengadministrasi Rehabilitasi Sosial	5	490
432.	Pengadministrasi Pengangkatan dan Pengakuan Anak	5	490
433.	Pelatih Satuan Perlindungan Masyarakat	5	490
434.	Teknisi Pemelihara Sarana dan Prasarana	5	490
435.	Teknisi Konservasi	5	490
436.	Pengadministrasi LLAJ	5	490
437.	Pemelihara Penerangan Jalan	5	490

No.	Nama Jabatan	Kelas	Nilai Jabatan
438.	Pengadministrasi Teknis Pemeriksaan dan Perawatan Kendaraan Bermotor	5	490
439.	Operator Terminal	5	490
440.	Pengadministrasi Kinerja Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	5	490
441.	Nahkoda	5	490
442.	Oiler	5	490
443.	Juru Pungut Retribusi	5	490
444.	Pelatih Atlet Disable	5	490
445.	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	490
446.	Teknisi Jaringan Instalasi	5	490
447.	Perawat Ternak	5	490
448.	Pengadministrasi Koleksi Tumbuhan	5	490
449.	Pengadministrasi Kependudukan	5	490
450.	Pengadministrasi Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, Pengangkatan dan Pengesahan Anak	5	490
451.	Juru Informasi dan Komunikasi	5	490
452.	Juru Pungut Kebersihan	5	490
453.	Pengadministrasi Pajak	5	490
454.	Pemandu Wisata	5	490
455.	Pengadministrasi Izin Usaha Pariwisata	5	490
456.	Pengadministrasi Kesenian dan Budaya Daerah	5	490
457.	Pengawas Olahraga	5	490
458.	Teknisi Sarana dan Prasarana	5	490
459.	Teknisi Perikanan Budidaya	5	490
460.	Teknisi Peralatan, Listrik dan Elektronika	5	490
461.	Pengadministrasi Perpustakaan	5	490
462.	Teknisi Peralatan dan Mesin	5	490
463.	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	5	490
464.	Pengadministrasi Anggaran	5	490
465.	Pengadministrasi Pertanahan	5	490
466.	Pengadministrasi Perizinan	5	490
467.	Pengadministrasi Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar	5	490
468.	Pengadministrasi Akses Permodalan	5	490
469.	Pengadministrasi Pengaduan Publik	5	490
470.	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	5	490
471.	Pranata Taman	5	490
472.	Juru Rawat jenazah	5	490
473.	Pengemudi Ambulance	4	440
474.	Pengemudi	3	340
475.	Petugas Keamanan	3	340
476.	Penjaga Taman Makam Pahlawan	3	340
477.	Juru Mesin	3	340
478.	Juru Mudi	3	340
479.	Pramu Bakti	1	190
480.	Pramu Kebersihan	1	190
481.	Pramu Taman	1	190

BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd
BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
AMRULLAH, S.H.
NIP.19710602 200604 1 005



LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR 74 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG
 HASIL EVALUASI JABATAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
 TIMUR

KELAS DAN NILAI JABATAN FUNGSIONAL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

No.	Nama Jabatan	Kelas	Nilai Jabatan
1.	Administrator Database Kependudukan Muda	9	1.355
2.	Administrator Database Kependudukan Pertama	8	1.280
3.	Administrator Kesehatan Madya	11	1.930
4.	Administrator Kesehatan Muda	9	1.355
5.	Administrator Kesehatan Pertama	8	1.280
6.	Analisis Akuakultur Pertama	8	1.215
7.	Analisis Kebijakan Madya	12	2.135
8.	Analisis Kebijakan Muda	10	1.735
9.	Analisis Kebijakan Pertama	8	1.280
10.	Analisis Kepegawaian Madya	11	1.930
11.	Analisis Kepegawaian Muda	9	1.355
12.	Analisis Kepegawaian Pertama	8	1.280
13.	Analisis Kepegawaian Penyelia	8	1.230
14.	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	7	1.005
15.	Analisis Kepegawaian Pelaksana	6	740
16.	Analisis Ketahanan Pangan Madya	11	1.930
17.	Analisis Ketahanan Pangan Muda	10	1.735
18.	Analisis Ketahanan Pangan Pertama	8	1.280
19.	Analisis Pasar Hasil Perikanan Pertama	8	1.280
20.	Analisis Pasar Hasil Perikanan Penyelia	8	1.245
21.	Analisis Pasar Hasil Perikanan Mahir	7	1.005
22.	Analisis Pasar Hasil Perikanan Terampil	6	755
23.	Analisis Pasar Hasil Pertanian Muda	9	1.355
24.	Analisis Pasar Hasil Pertanian Pertama	8	1.280
25.	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Muda	10	1.700
26.	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Pertama	8	1.220
27.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda	10	1.735
28.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Pertama	8	1.280
29.	Apoteker Utama	13	2.485
30.	Apoteker Madya	11	1.945
31.	Apoteker Muda	9	1.370
32.	Apoteker Pertama	8	1.295
33.	Arsiparis Madya	11	1.930
34.	Arsiparis Muda	9	1.355
35.	Arsiparis Pertama	8	1.280
36.	Arsiparis Penyelia	8	1.230
37.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7	1.005
38.	Arsiparis Pelaksana	6	740
39.	Asisten Apoteker Penyelia	8	1.245
40.	Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	7	1.020
41.	Asisten Apoteker Pelaksana	6	755
42.	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Penyelia	9	1.440

No.	Nama Jabatan	Kelas	Nilai Jabatan
43.	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	1.035
44.	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pelaksana/Terampil	6	720
45.	Asisten Apoteker Pemula	5	505
46.	Assessor SDM Aparatur Madya	12	2.135
47.	Assessor SDM Aparatur Muda	10	1.735
48.	Assessor SDM Aparatur Pertama	8	1.280
49.	Auditor Kepegawaian Madya	11	1.995
50.	Auditor Kepegawaian Muda	9	1.355
51.	Auditor Kepegawaian Pertama	8	1.280
52.	Auditor Madya	12	2.250
53.	Auditor Muda	10	1.655
54.	Auditor Pertama	8	1.280
55.	Auditor Penyelia	8	1.230
56.	Auditor Pelaksana Lanjutan	7	1.005
57.	Auditor Pelaksana	6	740
58.	Bidan Madya	11	1.930
59.	Bidan Muda	9	1.355
60.	Bidan Pertama	8	1.280
61.	Bidan Penyelia	8	1.230
62.	Bidan Mahir	7	1.005
63.	Bidan Terampil	6	740
64.	Bidan Pemula	5	540
65.	Dokter Gigi Utama	14	2.805
66.	Dokter Gigi Madya	12	2.225
67.	Dokter Gigi Muda	10	1.670
68.	Dokter Gigi Pertama	9	1.370
69.	Dokter Utama (Khusus <i>Specialist</i>)	15	3.335
70.	Dokter Utama	14	2.805
71.	Dokter Madya (Spesialis)	13	2.430
72.	Dokter Madya	12	2.295
73.	Dokter Muda (Spesialis)	11	1.950
74.	Dokter Muda	10	1.670
75.	Dokter Pertama	9	1.370
76.	Fisioterapis Madya	11	1.930
77.	Fisioterapis Muda	9	1.555
78.	Fisioterapis Pertama	8	1.280
79.	Fisioterapis Penyelia	8	1.230
80.	Fisioterapis Pelaksana Lanjutan	7	1.005
81.	Fisioterapis Pelaksana	6	740
82.	Guru Madya	11	1.960
83.	Guru Muda	9	1.385
84.	Guru Pertama	8	1.280
85.	Instruktur Madya	11	1.930
86.	Instruktur Muda	10	1.670
87.	Instruktur Pertama	8	1.280
88.	Instruktur Penyelia	8	1.230
89.	Instruktur Mahir	7	1.005
90.	Instruktur Terampil	6	740
91.	Mediator Hubungan Industrial Madya	11	1.930
92.	Mediator Hubungan Industrial Muda	10	1.720
93.	Mediator Hubungan Industrial Pertama	8	1.280
94.	Medik Veteriner Utama	13	2.485

No.	Nama Jabatan	Kelas	Nilai Jabatan
95.	Medik Veteriner Madya	11	1.930
96.	Medik Veteriner Muda	9	1.355
97.	Medik Veteriner Pertama	8	1.280
98.	Nutrisisionis Madya	11	1.930
99.	Nutrisisionis Muda	9	1.555
100.	Nutrisisionis Pertama	8	1.280
101.	Nutrisisionis Penyelia	8	1.230
102.	Nutrisisionis Pelaksana Lanjutan	7	1.005
103.	Nutrisisionis Pelaksana	6	740
104.	Okupasi Terapis Penyelia	8	1.230
105.	Okupasi Terapis Pelaksana Lanjutan	7	1.005
106.	Okupasi Terapis Pelaksana	6	740
107.	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Penyelia	8	1.230
108.	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Mahir	7	1.005
109.	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terampil	6	740
110.	Pamong Belajar Madya	11	1.930
111.	Pamong Belajar Muda	9	1.355
112.	Pamong Belajar Pertama	8	1.280
113.	Pamong Budaya Madya	11	1.930
114.	Pamong Budaya Muda	9	1.355
115.	Pamong Budaya Pertama	8	1.280
116.	Pamong Budaya Penyelia	8	1.230
117.	Pamong Budaya Pelaksana Lanjutan	7	1.005
118.	Pamong Budaya Pelaksana	6	740
119.	Paramedik Veteriner Penyelia	8	1.230
120.	Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan	7	1.005
121.	Paramedik Veteriner Pelaksana	6	740
122.	Paramedik Veteriner Pemula	5	540
123.	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Muda	10	1.640
124.	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pertama	8	1.280
125.	Penata Anestesi Madya	11	1.930
126.	Penata Anestesi Muda	9	1.355
127.	Penata Anestesi Pertama	8	1.280
128.	Penata Laksana Barang Terampil	7	1.070
129.	Penata Ruang Madya	11	1.930
130.	Penata Ruang Muda	9	1.355
131.	Penata Ruang Pertama	8	1.280
132.	Peneliti Madya	11	1.930
133.	Peneliti Muda	9	1.355
134.	Peneliti Pertama	8	1.280
135.	Penera Madya	11	1.930
136.	Penera Muda	9	1.555
137.	Penera Pertama	8	1.280
138.	Penera Penyelia	8	1.230
139.	Penera Mahir	7	1.005
140.	Penera Terampil	6	740
141.	Pengantar Kerja Madya	11	1.930
142.	Pengantar Kerja Muda	10	1.750
143.	Pengantar Kerja Pertama	8	1.280
144.	Pengantar Kerja Penyelia	8	1.230
145.	Pengantar Kerja Pelaksana Lanjutan	7	1.005

No.	Nama Jabatan	Kelas	Nilai Jabatan
146.	Pengantar Kerja Pelaksana	6	740
147.	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Pertama	8	1.265
148.	Pengawas Benih Tanaman Pertama	8	1.280
149.	Pengawas Bibit Ternak Madya	11	1.930
150.	Pengawas Bibit Ternak Muda	9	1.355
151.	Pengawas Bibit Ternak Pertama	8	1.280
152.	Pengawas Bibit Ternak Penyelia	8	1.230
153.	Pengawas Bibit Ternak Pelaksana Lanjutan	7	1.005
154.	Pengawas Bibit Ternak Pelaksana	6	740
155.	Pengawas Kemetrologian Madya	11	1.930
156.	Pengawas Kemetrologian Muda	9	1.355
157.	Pengawas Kemetrologian Pertama	8	1.280
158.	Pengawas Koperasi Muda	10	1.735
159.	Pengawas Koperasi Pertama	8	1.280
160.	Pengawas Lingkungan Hidup Madya	11	1.930
161.	Pengawas Lingkungan Hidup Muda	10	1.735
162.	Pengawas Lingkungan Hidup Pertama	8	1.280
163.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya	11	1.930
164.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda	9	1.355
165.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama	8	1.280
166.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Penyelia	8	1.230
167.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Lanjutan	7	1.005
168.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana	6	740
169.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pemula	5	490
170.	Pengawas Mutu Pakan Madya	11	1.930
171.	Pengawas Mutu Pakan Muda	9	1.355
172.	Pengawas Mutu Pakan Pertama	8	1.280
173.	Pengawas Mutu Pakan Penyelia	8	1.230
174.	Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Lanjutan	7	1.005
175.	Pengawas Mutu Pakan Pelaksana	6	740
176.	Pengawas Mutu Pakan Pemula	5	490
177.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Madya	11	1.930
178.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Muda	10	1.655
179.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Pertama	8	1.280
180.	Pengawas Perikanan Pertama	8	1.280
181.	Pengawas Perikanan Pelaksana	6	740
182.	Pengawas Sekolah Utama	13	2.585
183.	Pengawas Sekolah Madya	11	1.960
184.	Pengawas Sekolah Muda	9	1.385
185.	Pengawas Sekolah Pertama	8	1.310
186.	Pengelola Kesehatan Ikan Muda	9	1.490
187.	Pengelola Kesehatan Ikan Pertama	8	1.245
188.	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Madya	11	1.960
189.	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Muda	10	1.695
190.	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama	8	1.310
191.	Pengendali Dampak Lingkungan Madya	11	1.930
192.	Pengendali Dampak Lingkungan Muda	10	1.735
193.	Pengendali Dampak Lingkungan Pertama	8	1.310
194.	Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia	8	1.260
195.	Pengendali Dampak Lingkungan Mahir	7	1.035
196.	Pengendali Dampak Lingkungan Terampil	6	770

No.	Nama Jabatan	Kelas	Nilai Jabatan
197.	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya	11	1.930
198.	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Muda	9	1.355
199.	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama	8	1.295
200.	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia	8	1.245
201.	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Lanjutan	7	1.020
202.	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana	6	755
203.	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Madya	11	1.930
204.	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda	9	1.355
205.	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama	8	1.295
206.	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia	8	1.245
207.	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Lanjutan	7	1.020
208.	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana	6	755
209.	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pemula	5	555
210.	Penggerak Swadaya Masyarakat Madya	11	1.930
211.	Penggerak Swadaya Masyarakat Muda	10	1.735
212.	Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama	8	1.280
213.	Penggerak Swadaya Masyarakat Penyelia	8	1.230
214.	Penggerak Swadaya Masyarakat Mahir	7	1.005
215.	Penggerak Swadaya Masyarakat Terampil	6	805
216.	Penggerak Swadaya Masyarakat Pemula	5	555
217.	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia	8	1.260
218.	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan	7	1.035
219.	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana	6	770
220.	Penguji Kendaraan Bermotor Pemula	5	490
221.	Penguji Mutu Barang Pertama	8	1.295
222.	Penilik Madya	11	1.930
223.	Penilik Muda	9	1.355
224.	Penilik Pertama	8	1.280
225.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	2.030
226.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	1.385
227.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	1.310
228.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia	8	1.260
229.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	7	1.035
230.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana	6	770
231.	Penyuluh Lingkungan Hidup Pertama	8	1.105
232.	Penyuluh Pajak Mahir	7	1.005
233.	Penyuluh Pajak Terampil	6	740
234.	Penyuluh Perikanan Pertama	8	1.310
235.	Penyuluh Perikanan Penyelia	8	1.260
236.	Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan	7	1.035
237.	Penyuluh Perikanan Pelaksana	6	770
238.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Madya	11	1.930
239.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Muda	9	1.355
240.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pertama	8	1.310
241.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Penyelia	8	1.260
242.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pelaksana Lanjutan	7	1.035
243.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pelaksana	6	770
244.	Penyuluh Pertanian Utama	13	2.685
245.	Penyuluh Pertanian Madya	11	2.030
246.	Penyuluh Pertanian Muda	9	1.385
247.	Penyuluh Pertanian Pertama	8	1.310
248.	Penyuluh Pertanian Penyelia	8	1.260

No.	Nama Jabatan	Kelas	Nilai Jabatan
249.	Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan	7	1.035
250.	Penyuluh Pertanian Pelaksana	6	770
251.	Penyuluh Pertanian Pemula	5	570
252.	Penyuluh Sosial Madya	11	2.030
253.	Penyuluh Sosial Muda	9	1.385
254.	Penyuluh Sosial Pertama	8	1.310
255.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Utama	13	2.485
256.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya	11	1.930
257.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda	9	1.355
258.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama	8	1.280
259.	Perawat Gigi Penyelia	8	1.260
260.	Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	7	1.035
261.	Perawat Gigi Pelaksana	6	770
262.	Perawat Gigi Pelaksana Pemula	5	520
263.	Perawat Madya	11	1.960
264.	Perawat Muda	9	1.385
265.	Perawat Pertama	8	1.310
266.	Perawat Penyelia	8	1.260
267.	Perawat Mahir	7	1.035
268.	Perawat Terampil	6	770
269.	Perawat Pemula	5	520
270.	Perekam Medis Pertama	8	1.260
271.	Perekam Medis Penyelia	8	1.260
272.	Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	7	1.035
273.	Perekam Medis Pelaksana	6	770
274.	Perekayasa Madya	11	1.930
275.	Perekayasa Muda	9	1.355
276.	Perekayasa Pertama	8	1.280
277.	Perencana Madya	11	1.930
278.	Perencana Muda	10	1.610
279.	Perencana Pertama	8	1.280
280.	Polisi Pamong Praja Madya	11	1.975
281.	Polisi Pamong Praja Muda	9	1.400
282.	Polisi Pamong Praja Pertama	8	1.325
283.	Polisi Pamong Praja Penyelia	8	1.275
284.	Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan	7	1.050
285.	Polisi Pamong Praja Pelaksana	6	755
286.	Polisi Pamong Praja Pemula	5	490
287.	Pranata Hubungan Masyarakat Madya	11	1.930
288.	Pranata Hubungan Masyarakat Muda	9	1.355
289.	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	8	1.280
290.	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8	1.230
291.	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	7	1.005
292.	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana	6	740
293.	Pranata Hubungan Masyarakat Pemula	5	490
294.	Pranata Komputer Utama	13	2.485
295.	Pranata Komputer Madya	11	1.930
296.	Pranata Komputer Muda	9	1.355
297.	Pranata Komputer Pertama	8	1.280
298.	Pranata Komputer Penyelia	8	1.230
299.	Pranata Komputer Mahir	7	1.005
300.	Pranata Komputer Terampil	6	740
301.	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	5	490
302.	Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	11	1.930

No.	Nama Jabatan	Kelas	Nilai Jabatan
303.	Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	9	1.355
304.	Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	8	1.280
305.	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	1.230
306.	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	1.005
307.	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	6	740
308.	Pranata Laboratorium Kesehatan Pemula	5	540
309.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia	8	1.230
310.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir	7	1.005
311.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	6	840
312.	Pustakawan Madya	11	1.930
313.	Pustakawan Muda	9	1.355
314.	Pustakawan Pertama	8	1.280
315.	Pustakawan Penyelia	8	1.230
316.	Pustakawan Pelaksana Lanjutan	7	1.005
317.	Pustakawan Pelaksana	6	740
318.	Radiografer Penyelia	8	1.260
319.	Radiografer Pelaksana Lanjutan	7	1.035
320.	Radiografer Pelaksana	6	770
321.	Sandiman Madya	11	1.930
322.	Sandiman Muda	10	1.795
323.	Sandiman Pertama	8	1.280
324.	Sandiman Penyelia	8	1.230
325.	Sandiman Pelaksana Lanjutan	7	1.005
326.	Sandiman Pelaksana	6	740
327.	Sanitarian Madya	11	1.930
328.	Sanitarian Muda	9	1.370
329.	Sanitarian Pertama	8	1.295
330.	Sanitarian Penyelia	8	1.245
331.	Sanitarian Pelaksana Lanjutan	7	1.020
332.	Sanitarian Pelaksana	6	755
333.	Sanitarian Pemula	5	505
334.	Statistisi Madya	11	1.930
335.	Statistisi Muda	9	1.355
336.	Statistisi Pertama	8	1.280
337.	Statistisi Penyelia	8	1.230
338.	Statistisi Pelaksana Lanjutan	7	1.005
339.	Statistisi Pelaksana	6	740
340.	Statistisi Pemula	5	490
341.	Teknik Pengairan Madya	11	1.975
342.	Teknik Pengairan Muda	9	1.400
343.	Teknik Pengairan Pertama	8	1.325
344.	Teknik Pengairan Penyelia	8	1.275
345.	Teknik Pengairan Mahir	7	1.050
346.	Teknik Pengairan Terampil	6	755
347.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Utama	13	2.530
348.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Madya	11	1.975
349.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	9	1.400
350.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama	8	1.325
351.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Penyelia	8	1.275
352.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pelaksana Lanjutan	7	1.050
353.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pelaksana	6	755
354.	Teknisi Akuakultur Penyelia	8	1.290
355.	Teknisi Akuakultur Mahir	7	865

No.	Nama Jabatan	Kelas	Nilai Jabatan
356.	Teknisi Akuakultur Terampil	6	720
357.	Teknisi Akuakultur Pemula	5	520
358.	Teknisi Elektromedis Madya	11	1.930
359.	Teknisi Elektromedis Muda	9	1.355
360.	Teknisi Elektromedis Pertama	8	1.280
361.	Teknisi Elektromedis Penyelia	8	1.260
362.	Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	7	1.035
363.	Teknisi Elektromedis Pelaksana	6	770
364.	Teknisi Jalan dan Jembatan Utama	13	2.530
365.	Teknik Jalan dan Jembatan Madya	11	1.975
366.	Teknik Jalan dan Jembatan Muda	9	1.400
367.	Teknik Jalan dan Jembatan Pertama	8	1.325
368.	Teknik Jalan dan Jembatan Penyelia	8	1.275
369.	Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana Lanjutan	7	1.050
370.	Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana	6	775
371.	Teknisi Transfusi Darah Penyelia	8	1.230
372.	Teknisi Transfusi Darah Pelaksana Lanjutan	7	1.005
373.	Teknisi Transfusi Darah Pelaksana	6	740
374.	Teknisi Transfusi Darah Pemula	5	490
375.	Terapis Wicara Penyelia	8	1.230
376.	Terapis Wicara Pelaksana Lanjutan	7	1.005
377.	Terapis Wicara Pelaksana	6	740

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.
NIP.19710602 200604 1 005